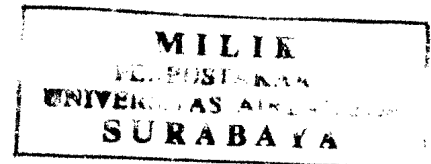


SKRIPSI

ARIE ROCHMALIA

**FIDUSIA ULANG DAN PREFERENSI PARA KREDITURNYA
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG No. 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**FIDUSIA ULANG DAN PREFERENSI PARA KREDITURNYA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM
UNTUK MEMENUHI SYARAT MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lisman Iskandar".

Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 525

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arle Rochmalla".

Arle Rochmalla
NIM. 039714547

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

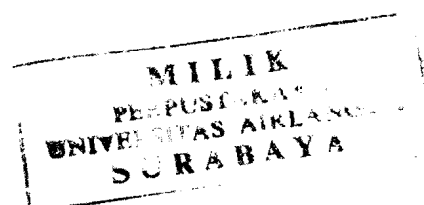
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

- a. Fidusia ulang diatur dalam Pasal 17, Pasal 28 dan Pasal 8 Undang-Undang Fidusia. Penyebutan urutan pasal-pasal tersebut disesuaikan dengan konstruksi yang mengikuti ketiga pasal tersebut. Pasal 17 dengan konstruksi yang tegas berisi norma larangan adanya fidusia ulang. Pasal 28 sebagai pendukung yang mempertegas Pasal 17. Sedangkan pasal 8 merupakan alternatif lain yang dapat diberikan pada debitur dalam hal fidusia ulang, yaitu pada suatu kredit sindikasi. Atau dengan kata lain bahwa fidusia ulang hanya dimungkinkan pada sebuah kredit sindikasi. Meskipun demikian, ada sesuatu yang mestinya diperhatikan dalam Undang-Undang fidusia tersebut, bahwa sebaiknya penegasan kemungkinan adanya fidusia ulang hanya ada pada kredit sindikasi langsung disebutkan dalam tubuh pasal yang kemudian baru dijabarkan lebih lanjut dalam penjelasannya. Hal ini akan lebih memperkecil kemungkinan kerancuan dan kesalahpahaman, mengingat, orang seringkali melupakan keberadaan penjelasan pasal dalam sebuah undang-undang.

- b. Dengan tidak dimungkinkannya fidusia ulang dalam perjanjian penjaminan fidusia perorangan, maka dalam hal inipun tidak ada preferensi kedua. Yang ada hanyalah hak mendahulu kreditur yang mendaftarkan jaminan fidusianya di kantor pendaftaran fidusia pertama kali. Dimana dalam hal ini kreditur penerima fidusia ulang tidak berkedudukan sebagai kreditur preferent, melainkan sebagai kreditur konkuren yang hanya bisa dipenuhi haknya setelah hak kreditur preferent terpenuhi. Dalam artian apabila terdapat sisa dari hasil penjualan benda jaminan setelah dikurangi pelunasan hutang pada kreditur preferent, barulah haknya pelunasan hutang dari penjualan benda jaminan akan dipenuhi. Sementara dalam perjanjian penjaminan fidusia dalam sebuah kredit sindikasi, kedudukan preferensi menggunakan asas persamaan antar kreditur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1132 dan Pasal 1136 BW. Dengan pernyataan bahwa jaminan dibagi rata oleh dan di antara kreditur sesuai dan sebanding dengan jumlah tagihan kredit yang diberikan dan wajib dibayar oleh nasabah/debitur, dimana hal ini telah ditentukan sebelumnya dari perjanjian kredit sindikasi yang ditandatangani oleh bank-bank yang terlibat dan diketahui oleh debitur. Dalam fidusia pada kredit sindikasi ini juga terdapat banyak risiko baik bagi debitur maupun bagi kreditur. Bagi debitur risiko yang ditanggung adalah banyaknya fee yang harus dibayar disamping hutang pokok dan bunga, sehingga semakin membuat



beban pembayaran makin tinggi. Sedangkan bagi kreditur, dengan semakin banyaknya hutang, risiko kerugian karena tidak mampunya debitur membayar hutang tersebut pun juga semakin besar.

2. Saran

- a. Perlu adanya perbaikan-perbaikan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia, misalnya dengan mengubah susunan pasal sesuai dengan konstruksi atau maksud dari dicantumkannya pasal tersebut seperti urutan Pasal 8, Pasal 17 dan Pasal 28 diubah menjadi Pasal 17 terlebih dahulu, Pasal 28 barulah kemudian Pasal 8. Selain itu, perubahan lain yang cukup penting adalah penegasan kemungkinan fidusia ulang hanya pada kredit sindikasi (Pasal 8), hendaknya tercantum dalam tubuh pasal dan bukannya pada penjelasan pasal. Sehingga nantinya dapat mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi masyarakat.
- b. Dengan tidak diperbolehkannya fidusia ulang, hendaknya kreditur sebelum menerima benda jaminan meneliti lebih dahulu secara seksama status benda jaminan tersebut. Jangan sampai benda tersebut telah dijaminkan atau bahkan sedang dijaminkan kepada orang lain. Sedangkan pada fidusia ganda dalam kredit sindikasi, dengan tingginya beban tanggungan hutang dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh debitur :

- Bagi debitur, hendaknya debitur memperhitungkan terlebih dahulu tentang kemampuannya untuk membayar hutang--
- Bagi para kreditur, hendaknya memiliki komitmen tersendiri diantara mereka tentang peran dan kedudukan yang jelas serta fee yang akan diterima berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga nantinya bila terjadi kerugian tidak akan terjadi konflik diantara para kreditur (bank) tersebut.